

# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL SAINS, TEKNOLOGI, DAN MULTIDISPLIN**

*Pontianak, 20 Oktober 2016*

Tema:

*“Karya Inovasi Sains, Teknologi, dan Multidisiplin untuk  
Pembangunan Berkelanjutan”*

Editor:

YUSNIARDI, M.Kom, DEWI ISMU PURWANINGSIH, S.Pd., M.A,  
SUDIRMAN, M.Pd, SRI NURHAYATI, M.MA  
ALFATH DESITA JUMIAR, M.Si, DEDEK KURNIAWATI, M.Pd,  
MAHYARUDIN, M.Si, SITI NUR ASMAH, M.Pd  
SIGIT NORMAGIAT, M.Sc



UNU Kalbar Press

Bekerja sama dengan



Lembaga Sains Teknologi dan Multidisiplin  
UNU Kalbar

**PENYELENGGARA:**

UNIVERSITAS NAHDHATUL ULAMA  
(UNU) KALIMANTAN BARAT  
Jl. KH. Achmad Dahlan No.72 Pontianak  
Telp. 0561-731615  
email: universitasnukalbar@gmail.com

**EDITOR:**

YUSNIARDI, M.Kom  
DEWI ISMU PURWANINGSIH, S.Pd., M.A  
SUDIRMAN, M.Pd.  
SRI NURHAYATI, M.MA  
ALFATH DESITA JUMIAR, M.Si  
DEDEK KURNIAWATI, M.Pd.  
MAHYARUDIN, M.Si  
SITI NUR ASMAH, M.Pd  
SIGIT NORMAGIAT, M.Sc

**PENATA LETAK:**

ROSADI JAMANI

**DESAIN COVER:**

ROSADI JAMANI

**JUMLAH DAN UKURAN HALAMAN:**

xi+ 512 : 21 x 29,7 cm

**PENERBIT:**

UNU KALBAR PRESS  
Jl. KH. Achmad Dahlan No.72 Pontianak  
Telp. 0561-731615

Cetakan Pertama, November 2016

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

---

**ISBN**

---

**978 - 602 - 74511 - 2 - 4**

# REVIEWER

## BIDANG SAINS

1. Dr. Deden Saprudin, SSi, MSi (Institut Pertanian Bogor)
2. Dr. Rachmat Sahputra, M.Si (Universitas Tanjungpura Pontianak)

## BIDANG TEKNOLOGI

1. Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS. (UNU Sumatera Utara)
2. Aulia Riza Farhan, M.Sc. Ph.D. (Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
3. Dr. Mahmud Mustain (Fak. Teknologi Kelautan ITS Surabaya)

## BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN HUMANIORA

1. Prof. Dr. Nasrudin Suyuti, M.Si. (Universitas Haluoleo, Sulawesi Utara)
2. Dr. Clarry Sada, M.Pd. (Universitas Tanjungpura Pontianak)
3. Dr. Andy Usman, M.Pd. (Universitas Tanjungpura Pontianak)
4. Dr. Agung Hartoyo, M. Pd. (Universitas Tanjungpura Pontianak)
5. Dr. M. Rif'at, M. Pd. (Universitas Tanjungpura Pontianak)

41649	KOMPARASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TPS DAN KONVENSIONAL MATERI LIMAS DITINJAU DARI GENDER SISWA <i>Maliza</i>	422
41650	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN AKTIF TIPE INDEX CARD MATCH PADA MATERI PECAHAN <i>Nur Gayatri Jatiningrum</i>	430
41651	PENERAPAN MODEL PROBLEM POSING UNTUK MENINGKATKAN AKTIFITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA <i>Supadmi</i>	440
41652	POLA “V” DAN “7” UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI STATISTIKA <i>Veneranda Suri Mappan</i>	445
41653	PENGEMBANGAN METODE EKSTRAKSI PADA ANALISIS BORON DALAM SAMPEL MAKANAN SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS <i>Nurul Apsari</i>	453
41654	PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT DAYAK DI KALIMANTAN BARAT <i>Clarry Sada</i>	463
41655	KAJIAN PENGARUH PERGESERAN BORDER DAERAH PERBATASAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU <i>Syarif Agussaid Alkadrie dan Alawiyah Almuthahar</i>	471
41656	PEMANFAATAN KULIT BUAH NIPAH ( <i>Nypa fruticans</i> ) SEBAGAI KARBON AKTIF UNTUK BAHAN PENJERNIH AIR <i>Adha Panca Wardanu</i>	481
41657	UPAYA MEMPERPANJANG UMUR SIMPAN BUAH RAMBAI ( <i>BACCAUREA MOTLEYANA</i> ) DENGAN BERBAGAI JENIS PENGEMAS PLASTIK DAN METODE PENGEMASAN <i>Encik Eko Rifkowitz</i>	490
41657	KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Kasus Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Konstituennya <i>Rosadi</i>	501

# KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

## Kasus Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Konstituennya

Rosadi

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

Email: [ros\\_adi09@yahoo.co.id](mailto:ros_adi09@yahoo.co.id)

### Abstrak

*Penelitian ini berusaha mengungkap komunikasi politik anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak dengan konstituennya. Pengungkapan ini dilatarbelakangi oleh perolehan kursi di legislatif pada Pemilu tahun 1999, pada mana PKS hanya mendapat satu kursi, tapi di Pemilu tahun 2004, berhasil mendapatkan empat kursi di DPRD Kota Pontianak.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa salah satu kunci keberhasilan PKS meraih empat kursi di DPRD Kota Pontianak disebabkan komunikasi intensif yang dibangun dalam waktu yang cukup lama. Komunikasi politik yang intensif berupa jenjang pengkaderan yang dibangun secara sistematis yang menimbulkan rasa persatuan dan kekeluargaan antar seluruh kader PKS, sehingga pada Pemilu 2004 mereka bergerak serempak dan satu irama. Kerja keras anggota fraksi PKS didukung kader dan pengurus PKS menimbulkan simpati luas dari konstituen mereka sehingga berhasil meraih empat kursi legislatif. Dari komunikasi tersebut mereka juga memiliki tingkatan konstituen mulai kalangan pemuda, mahasiswa, kaum profesional, ibu-ibu dan kalangan umum. Dalam melakukan komunikasi ada hambatan yang mereka hadapi, yaitu masalah waktu, sumber daya manusia (SDM), dan dana. Kemudian, faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama seluruh kader dan pengurus partai, media massa, dan alat transportasi dan komunikasi.*

*Kata kunci: komunikasi politik dan Pemilihan Umum*

### Abstrack

*This thesis to express the political communications of the faction's member Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pontianak City government with their constituents. This background of this expression is based on the acquirement of chairs in legislative at Pemilu year of 1999, PKS got only one chair, but in Pemilu (general election) year of 2004, was successful with getting four chairs in DPRD Pontianak city.*

*The base on of the result of this research, researcher finds that one of efficacy keys PKS reached four chairs in DPRD Pontianak city was caused by the intensive communications which where develop in the long enough time. Intensive political communications in the form of systematic cadre ladder results unity and familiarity among all PKS cadres, so that at Pemilu 2004 they move together in concern and one rhythm. The hard working of PKS faction member was supported by the cadres and official member of PKS generate the wide sympathies of their constituent so that succeeded to reach four legislative chairs. From the communications they also have the constituents level such as the young man circle, students, professional group, common public circle and mothers. In doing the communications*

*there is the resistance they face, the problem of time, human resources, and fund. Then, its supporting factor are the cooperated of activity all cadres and official members of party, mass media, and transportations and communications.*

*Keyword: political communications and general election.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam dunia politik, komunikasi politik sangat diperlukan, khusus para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebagai anggota DPRD memerlukan komunikasi politik dengan pemilih (konstituen) mereka atau dengan berbagai pihak. Berbagai cara dilakukan oleh para wakil rakyat dalam melakukan komunikasi politik tersebut. Ada para anggota DPRD turun langsung ke konstituen mereka secara berkala, ada juga yang melakukan komunikasi politik lewat media massa, dan ada pula yang melakukannya melalui kunjungan formal. Semua itu bertujuan agar komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD berlangsung harmonis dengan konstituennya. Apabila komunikasi politik tidak harmonis, maka akan terjadi gejolak terutama oleh konstituen yang meminta pertanggungjawaban dari aktor politik yang dipilih mereka.

Komunikasi politik antara wakil rakyat dengan konstituennya, sering menjadi pertanyaan berbagai pihak. Minimnya komunikasi antara wakil rakyat di DPR/DPRD dengan konstituennya yang menunjukkan akuntabilitas mereka menjadi tidak jelas. Wakil rakyat lebih merasa bertanggung jawab kepada partai dari pada kepada rakyatnya, sehingga wakil rakyat lebih tepat disebut wakil Partai Politik (Surbakti, 2006:2). Hubungan politik antara wakil rakyat dengan konstituennya menjadi tidak jelas. Kemudian, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah hampir seluruh anggota Dewan beranggapan bahwa terpilih atau tidak terpilih sama sekali tidak tergantung pada rakyat konstituennya, tetapi tergantung pada partainya (Ardial, 2006:2). Ini berarti bahwa komunikasi politik para wakil rakyat selama ini mengikuti pemikiran Ardial tersebut pada mana terpilihnya seorang anggota DPRD bukan disebabkan kepiawaian berkomunikasi, melainkan disebabkan nama besar partai politik.

Partai tidak membuat desain dan infrastruktur untuk melakukan komunikasi politik berdasarkan platform partai, sehingga sosialisasi sering dilakukan secara tidak sistematis dan ad hoc, dan hanya untuk kepentingan kemenangan Pemilu saja (Ardial: 2006:3). Di sini Ardial lain lagi, apa pun bentuk program yang direncanakan partai politik bukan untuk kepentingan konstituennya, melainkan untuk meraih suara tertinggi di Pemilu. Dalam melakukan komunikasi politik, partai belum membuat alat ukur yang dapat dipahami oleh konstituen dan publik untuk mengukur kinerja dan konsistensi partai dalam mengimplementasikan platformnya. Kemudian, ada yang mengakui komunikasi politik di hampir seluruh elemen di negeri ini masih buruk, baik secara vertikal maupun horizontal (Ardial, 2006:2). Dari beberapa pendapat di atas, menurut hemat penulis bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Hal ini berpengaruh pada komunikasi politik pada mana keduanya tidak berjalan baik.

Akibat tidak jelasnya alat ukur komunikasi politik ini, dari beberapa fakta yang penulis temukan di surat kabar, ada masyarakat yang mengaku konstituen menuntut anggota DPRD meletakkan jabatan (Harian Metro, 23 Desember 2006:1). Alasannya, kontribusi atau perhatian anggota DPRD terhadap konstituen tidak ada. Dalam kasus ini, berarti terjadi ketidakharmonisan komunikasi politik antara anggota DPRD dengan para konstituennya sendiri.

Dari dua pendapat di atas menunjukkan telah terjadi minim komunikasi politik para wakil rakyat dengan konstituennya, sehingga menyebabkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban mereka menjadi tidak jelas. Selain itu, akibat minimnya komunikasi politik itu, para wakil rakyat lebih mengutamakan partai ketimbang konstituennya sendiri. Pendapat di atas tidak bisa menyamaratakan seluruh wakil rakyat. Banyak anggota DPRD tidak jelas bagaimana komunikasi politik dengan para konstituennya.

Akan tetapi, tidak demikian dengan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pontianak yang selalu aktif melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Berbagai cara dilakukan untuk menjalin komunikasi ini, seperti Taklim Rutin Partai yang diisi dengan ceramah agama dan ajang penyampaian aspirasi oleh konstituennya digelar setiap

dua minggu sekali, evaluasi anggota dewan digelar empat bulan sekali dengan mengundang seluruh konstituennya, reses atau masa libur untuk menyerap aspirasi pemilih, ceramah rutin secara personal masing-masing anggota fraksi dan temu tokoh digelar pada momen-momen tertentu.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dipublikasikan lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Tingginya komunikasi politik yang dilakukan PKS, membuat partai ini jarang diterpa persoalan politik, perpecahan internal, aksi penurunan jabatan oleh konstituennya. Selain itu, PKS pada tahun 1999 memperoleh satu kursi di DPRD Kota Pontianak, namun di tahun Pemilu 2004, partai yang dijuluki partai kader atau partai dakwah ini berhasil meraih empat kursi. Jumlah ini cukup signifikan bagi partai baru. Tidak hanya itu, PKS di tingkat nasional berhasil menjadi partai yang memenuhi electoral threshold (batas minimal perolehan suara 3 %). PKS saat ini sudah dikategorikan partai tengah (partai yang berada antara partai besar dengan partai kecil). Perolehan suara ini tidak lepas dari upaya komunikasi politik yang dibangunnya dalam waktu cukup lama. Daya tarik lainnya, PKS memiliki sistem partai yang kuat, sehingga proses kaderisasinya jelas. Sehingga, anggota DPRD dari PKS yang terpilih bukanlah figur terkenal, melainkan muka baru atau pendatang baru dalam dunia politik.

Selain itu, anggota partai yang telah menduduki kursi Dewan, anggota Dewan tersebut tidak boleh menjabat ketua partai. Tujuannya, agar anggota Dewan itu benar-benar konsentrasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sistem ini, menjadikan seluruh fungsionaris partai PKS bersemangat memajukan partai, dan mereka bekerja tidak kenal waktu. Semangat ini juga dipicu oleh doktrin agama, bahwa mengurus partai juga bagian dari dakwah Islam (Visi dan Misi PKS, 2004:4)

Berdasarkan persoalan inilah, penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai komunikasi politik anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak dengan konstituennya.

## **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian ilmiah harus dilakukan melalui seperangkat metode, cara dan alat yang benar berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan. Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari jawaban (Salim, 2006:45). Metode dikaitkan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang sedang diteliti (Koentjaraningrat, 1991:16). Sementara menurut Nazir (1999:51) dalam metode ada kaidah prosedur yang mesti dilewati. Prosedur memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Sehingga Noeng (1996:3) berpendapat, pada dasarnya penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, metode pada penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara menyeluruh komunikasi politik satu arah anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak dengan konstituennya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir 1999:63), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dan suatu fenomena.

Alasan pemilihan penelitian jenis deskriptif karena data yang didapatkan dari hasil pengamatan, interaksi atau bergaul langsung dengan anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak dan konstituennya. Lebih cocok penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, bisa didapatkan hasil penelitian lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiyono, 2005:180-181).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di mana aktivitas politik sering dilakukan oleh tokoh agama dalam melakukan aktivitas, seperti gedung DPRD Kota Pontianak, kantor DPD. PKS Kota Pontianak, termasuk kediaman mereka.

Di lokasi ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data primer. Selain itu, tempat tinggal konstituennya maupun lokasi di mana para konstituen itu menghadiri kegiatan yang dilakukan



anggota fraksi PKS. Di lokasi ini, penelitian berusaha mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Data kualitatif adalah fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor, aktivitas dan tempat yang menjadi subjek telitinya (Rasyid, 2000:36). Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data utama (dalam Lexy, 2001:112).

Data terbagi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari informan, baik dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Di dalam penelitian naturalistik yang dijadikan informan hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi (Nasution, 1996:32). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek berupa informan sebagai sumber data primer dan lembaga sebagai objek untuk memperoleh data sekunder.

Sumber data adalah orang yang dapat memberikan informasi, data-data atau keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan atau sumber data yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun informasi dari hasil wawancara. Informan dapat juga disebut sebagai sumber data yaitu subjek yang berupa informan sebagai sumber data primer dan lembaga sebagai objek untuk memperoleh data sekunder.

Menurut Koentjaraningrat (1991:212) membagi informan itu menjadi dua, yakni informan pangkal dan informan kunci atau pokok. Informan pangkal adalah orang yang betul-betul mengetahui terhadap objek yang diteliti, kemudian dapat mengarahkan peneliti untuk mencari informan lain (informan pokok). Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari informan, apabila dipandang perlu untuk dikonfirmasi dan melengkapi data, maka wawancara dilanjutkan pencarian data kepada informan pokok selanjutnya. Pada penelitian ini yang ditentukan untuk menjadi informan adalah:

- a. Informan Pangkal adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pontianak.
- b. Informan kunci atau informan pokok didapatkan dari Ketua Fraksi PKS, dan Anggota Fraksi PKS.

Untuk data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari kepustakaan maupun literatur-literatur baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dokumen/arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pontianak maupun Pemerintah Kota Pontianak beserta instansinya.

### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data pada penelitian ini adalah metode atau cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Agar data yang diperoleh semakin tepat, akurat, serta diinginkan, maka penelitian ini mempergunakan dua teknik pengumpulan data, yakni:

#### a. Teknik Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan dalam penelitian merupakan suatu rangkaian aktivitas penelitian guna pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung ke lapangan. Namun, peneliti hanya melakukan observasi non-participant. Menurut Kartono (1996:157) tujuan observasi ialah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola-pola kultural tertentu. Teknik ini untuk menghimpun data yang tidak diperoleh penulis melalui teknik wawancara serta untuk melihat secara langsung aktivitas dan fasilitas anggota legislatif dalam proses menyerap dan menyalurkan setiap aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat berupa catatan-catatan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dari responden atau informan dengan cara mengajukan garis-garis besar pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan. Caranya, dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara dilakukan secara mendalam serta bebas terpinpin. Menurut Soehartono (1995:65),



wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan dan jawaban-jawaban itu dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Tujuan dari penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dengan informan mengenai objek yang diteliti.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menggunakan alat-alat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membantu perekam suara, kamera, dan alat-alat elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, sehingga pengamatan di lapangan dapat tercekam lebih sempurna.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk menjaring data dan informasi yang akan diperlukan baik dengan dalam waktu melakukan observasi lapangan maupun pada saat wawancara. Alat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Observasi atau Daftar pengecek (check list) berupa sebuah daftar pengecek, berisikan ciri-ciri khusus atau faktor-faktor tertentu dengan memberikan tanda ceklis (√) tentang ada atau tidak adanya ciri atau faktor tersebut pada waktu observasi (pengamatan) di lokasi penelitian atau lapangan. Dengan adanya panduan memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan pengamatan sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Pedoman Wawancara berupa instrumen atau alat yang berisi sejumlah pertanyaan yang disiapkan sera diajukan oleh penulis kepada informan, dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menambahkan informasi selama tidak menyimpang dari permasalahan. Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi peneliti, agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang diteliti, serta membuat wawancara menjadi terarah, sehingga apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan objek penelitian bisa tercapai.

6. Alat Dokumentasi

a. Kamera

Kamera di gunakan untuk mengambil gambar atau kejadian dari objek yang diamati yang berkaitan dengan aspek penelitian sebagai data dan dokumen selama penelitian berlangsung.

b. Tape Recorder

Tape recorder digunakan sebagai alat bantu untuk merekam percakapan selama melakukan wawancara dengan informan, sehingga peneliti terbantu dan mendapatkan informasi yang lengkap, selain melakukan pencatatan. Jenis alat perekam yang digunakan ada dua jenis yaitu walk man merk Sony dan Media Player (MP) 3 merk Ixus Nano

c. Buku catatan

Buku catatan digunakan untuk mencatat segala informasi yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik saat melakukan observasi maupun wawancara. Buku catatan dimaksud berupa block note.

d. Photo Copy

Photo Copy merupakan alat yang digunakan untuk menggandakan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan penggandaan tersebut memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Purwoko (1999:36), analisis data dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Proses reduksi data meliputi membaca dengan hati-hati identifikasi tema-tema utama dari proses penelitian, tingkah laku dan sebagainya.

- b. Pengorganisasian data. yaitu proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini juga meliputi kategorisasi informasi yang lebih spesifik dan menampilkan hasilnya dalam beberapa format seperti graft, Label dan sejenisnya.
- c. Interpretasi data, yaitu meliputi proses pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Proses ini juga meliputi identifikasi pola-pola menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek-aspek tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan ke arch sudut pandang yang lebih tegas, yang selanjutnya akan menuntun peneliti dalam langkah-langkah selanjutnya.

Setelah seluruh data diperoleh dan dikumpulkan serta diolah sesuai dengan proses yang telah disebutkan di atas, selanjutnya semua data dianalisis dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong 2000:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organ ke dalam sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan suatu pengolahan data yang diklasifikasikan menurut kategori tertentu dan selanjutnya diadakan interpretasi, kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan masing-masing dan dianalisis berdasarkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat sekarang serta akan digunakan label tunggal dan pada pengolahan selanjutnya dipergunakan analisis kualitatif.

Berkenaan penelitian ini, maka semua analisis data untuk mengetahui komunikasi politik anggota fraksi PKS Kota Pontianak dengan konstituennya, dilakukan dengan metode analisis kualitatif atau analisis non-statistik, sehingga sesuai untuk data deskriptif atau data textular (Suryabrata, 2002:85). Di sini data kuantitatif tidak menjadi yang pokok atau utama, tetapi dapat menjadi rujukan atau penunjang data. Menurut Faisal (1999:255), data kuantitatif dijadikan salah satu rujukan saja dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam bentuk label dapat menghasilkan penjelasan atau keterangan secara kualitatif, sehingga semua interpretasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang komunikasi politik anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti mencoba memulainya dari sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Seluruh anggota fraksi PKS di DPRD Kota Pontianak sebelum bergabung dengan PKS, mereka adalah orang biasa, ada yang guru SMA, pegawai swasta, guru swasta, guru mengaji. Begitu ada sosialisasi dan rekrutmen politik yang dilakukan PKS mereka tertarik, lalu bergabung sebagai anggota awalnya. Untuk masuk ke dalam barisan PKS ada proses komunikasi yang mereka lalui. Proses komunikasi yang mereka alami adalah komunikasi intrapersonal yakni komunikasi di mana individu menerima rangsangan dari luar ke pusat saraf, dan selanjutnya pusat saraf akan memberi reaksi yaitu proses berpikir, berdoa, bermeditasi, melamun dan sebagainya (Wahyudi, 1991:4). Adanya sosialisasi dan rekrutmen politik dari PKS membuat mereka berpikir dan mencerna apakah bergabung atau tidak. Setelah proses itu dilalui, maka mereka akan memutuskan untuk bergabung dengan PKS. Dari keempat anggota fraksi PKS tersebut, ada memerlukan waktu seminggu, sebulan, bahkan ada yang tiga bulan untuk memutuskan waktu bergabung dengan PKS.

Ketika mereka memutuskan bergabung dengan PKS, maka proses komunikasi yang dijalani adalah komunikasi interpersonal, yakni komunikasi yang dilakukan antar individu saling tatap muka (face to face), di mana keduanya bisa saling tukar informasi (Wahyudi, 1991:5). Sebenarnya komunikasi seperti ini sudah mereka lalukan juga saat sebelum bergabung dengan PKS. Ajakan dari pengurus PKS agar mereka mau bergabung sudah menjalani proses komunikasi interpersonal. Namun, intensitasnya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan ketika sudah masuk sebagai anggota PKS.

Karena loyalitas dan dedikasi mereka tinggi terhadap PKS, akhirnya mereka menjadi fungsionaris partai. Maksudnya, dari anggota biasa bisa menjadi pengurus inti PKS. Ketika mereka menjadi fungsionaris PKS, komunikasi politik yang banyak dilakukan adalah komunikasi kelompok, yakni komunikasi antara seseorang dengan kelompoknya, atau

kelompok dengan individu (Wahyudi, 1991:5). Contoh komunikasi kelompok yang mereka lakukan, mengikuti rapat-rapat partai, mengadakan pengajian dengan masyarakat, melakukan konsolidasi dengan konstituen.

Dari proses komunikasi tersebut di atas, mereka juga sering melakukan komunikasi massa, yakni proses komunikasi dengan massa, atau proses komunikasi dengan menggunakan media massa (Wahyudi, 1991:8). Upaya untuk menyampaikan visi dan misi partai, ide pemikiran dengan masyarakat mereka juga sering menggunakan media massa (cetak maupun elektronik), agar apa yang ingin disampaikan bisa tersebar luas di masyarakat.

Pada saat Pemilu 2004, mereka berhasil menduduki daftar nomor urut satu di Daerah Pemilihan (Dapil) nya masing-masing. Proses rekrutmen politik di dalam tubuh PKS banyak jenjang atau tingkatannya. Untuk sampai menjadi anggota calon legislatif ada sejumlah jenjang mesti ditempuh oleh kader PKS. Jenjang rekrutmen pertama yang harus dilalui seorang kader sebelum menjadi anggota legislatif PKS adalah mengikuti Training Orientasi Partai (TOP) tahap pertama atau sering disebut Top 1.

TOP 1 merupakan media rekrutmen pertama bagi orang yang ingin bergabung PKS. Jumlah peserta yang mengikuti media rekrutmen ini tidak terbatas atau massal, bebas dari kalangan mana saja. Ada dua tujuan bagi orang yang ingin mengikuti TOP 1 ini, pertama ingin terlibat praktisi politik partai, kedua ingin memahami nilai-nilai Islam yang dibangun di partai. Materi yang dalam media ini adalah mengenai agama Islam secara lengkap. Setelah itu, barulah disampaikan mengenai kiprah PKS dalam dunia politik. Mengenai waktu atau hari pelaksanaan TOP 1 biasanya mencari hari-hari libur seperti hari Minggu atau tanggal merah, dan lamanya kegiatannya hanya satu hari. Mengenai tempat pelaksanaan, bisa di aula, gedung serba guna.

Setelah mengikuti TOP 1, para peserta tidak dibiarkan begitu saja, harus ada follow up (tindak lanjut). Tindak lanjut ini dikhususkan untuk peserta yang tertarik bergabung dengan PKS. Kegiatan follow up ini dinamakan Taklim Rutin Partai (TRP). Biasanya, peserta TRP ini berkurang dari jumlah peserta TOP 1, misalnya dari 80 orang berkurang menjadi 20 orang. Di jenjang pengkaderan ini, lamanya waktu yang digunakan berkisar antara dua sampai tiga bulan. Dengan waktu itu, mereka gunakan untuk pengukuhan, pemastian bagi orang yang ingin benar-benar menjadi anggota PKS. Proses pengukuhan ini biasa mereka sebut TOP tahap dua (TOP 2). Peserta yang sudah mengikuti TOP 2 ini sudah betul-betul memilih PKS sebagai kendaraan politiknya. Ternyata, proses pengkaderan belum habis di tahap TOP 2, masih ada sederetan tahap pengkaderan lanjutan.

Setelah TOP 2 itu, para peserta harus mengikuti proses pengkaderan yang dinamakan Taklim Rutin Kader (TRK) pemula. Dalam tahap ini peserta dipecah-pecah menjadi kelompok kecil. Misalnya dari 20 peserta, dipecah menjadi lima orang per kelompok kecil. Setiap kelompok kecil itu disiapkan satu orang pembina. Berarti, dari 20 peserta ada empat kelompok kecil yang masuk dalam tahap pemula ini.

TRK pemula ini mirip dari pengajian yang banyak ditemukan di masyarakat, ada jemaahnya dan ada pembinanya atau ustaznya. Cuma, ada beberapa perbedaan mencolok dengan pengajian biasa. Kalau di pengajian biasa, praktik ibadah seperti salat, tilawah (baca Alquran, puasa) para jemaahnya tidak dievaluasi oleh ustaznya. Sementara di TRK ini, praktik ibadah jemaah atau kader dievaluasi oleh ustaznya. Jika ada praktik ibadah seorang jemaah turun, ditanya apa penyebabnya, kemudian diberikan bimbingan agar ibadahnya tetap stabil. Begitu juga dengan ibadah lain, seperti tahajud selalu ditanya, apakah tetap dijalankan atau tidak. Dengan adanya evaluasi ini berpengaruh kepada tingkat kesadaran terhadap Tuhan (Allah) kepada seluruh jemaah. Selain itu, pengajian tersebut membuat ikatan persatuan, kekeluargaan, kesetiakawanan semakin kuat. Fenomena ini menimbulkan pengaruh besar bagi perkembangan PKS di mana para kadarnya memiliki militansi kuat.

Lamanya waktu pengkaderan di TRK pemula sekitar setahun yang merupakan masa standar sebelum memasuki pengkaderan selanjutnya yang dinamakan TRK Muda. Namun, masa setahun tersebut bukan berarti seorang kader sudah bisa mengikuti TRK Muda. Ada indikator lain yang sangat menentukan bagi seorang kader PKS untuk mengikuti TRK Muda. Indikator tersebut dinamakan muwashofat, artinya sifat-sifat kader. Maksudnya, seorang kader tidak cukup mengikuti masa pengkaderan selama setahun, tapi juga diperhatikan sifat-sifatnya apakah benar-benar berubah sesuai dengan keinginan partai. Ada seratus lebih indikator sifat kader yang mesti diikuti oleh seorang kader sebelum masuk ke TRK Muda. Namun, secara umum indikator yang mesti dipenuhi oleh seorang kader adalah aqidahnya (keyakinan

terhadap Tuhan), aspek ibadahnya (pengamalan praktik ibadah), akhlaknya (perilaku), mualamalahnya (pergaulan dengan masyarakat), kemudian jasmaninya (kesehatan) dan pemikirannya (wawasan). Dari item pokok itu kemudian dipecah lagi secara detail sehingga jumlah mencapai seratus lebih. Jika seluruh item yang telah ditentukan bisa terpenuhi, maka kader itu barulah boleh mengikuti TRK Muda. Bagi kader yang telah memenuhi semua item itu, dia berhak menyandang status anggota muda PKS, dan dia sudah bisa mengisi jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pimpinan Ranting di struktur partai tingkat ranting atau tingkat kelurahan atau desa. Sementara untuk jabatan lain seperti sekretaris, bendahara, dan unit adalah kader yang menyandang status pemuda.

Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga PKS, kader yang sudah mendapatkan status anggota muda harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertakwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan, memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas, dan umur tidak kurang dari 18 tahun (ART PKS, 2002).

Kader yang masuk dalam pengkaderan TRK muda, sistem pengkaderannya tidak jauh berbeda dengan TRK pemuda. Bedanya, di TRK muda sistem pengkaderannya lebih intensif lagi, artinya ada beberapa hal yang kurang selama masa TRK pemuda, di tahap ini semakin dimantapkan. Selain itu, masa waktunya kurang lebih dua tahun. Untuk lulus dari pengkaderan tahap muda ini tidak hanya harus mengikuti masa dua tahun, tapi harus memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan. Jumlah indikatornya sekitar seratus lebih, dan tidak jauh berbeda dengan indikator TRK pemuda, cuma bedanya, sifat lebih pribadi. Kader yang dinyatakan lulus berhak menyandang status anggota muda. Bagi yang tidak lulus harus mengikuti TRK pemuda lagi. Bagi yang sudah menyandang status anggota muda, dia berhak mengisi jabatan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berkedudukan di kecamatan. Untuk jabatan ketua dan wakil ketua DPC, tidak boleh status anggota muda, melainkan harus menyandang status anggota madya dengan umur tidak kurang dari 20 tahun.

Selanjutnya, kader yang telah mengikuti TRK muda, dia harus mengikuti TRK madya. Sistem pengkaderannya tidak jauh berbeda dengan TRK muda, bedanya cuma masa pengkaderan mencapai waktu tiga tahun. Bagi kader yang telah menyandang status anggota madya, dia boleh mengisi jabatan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berkedudukan di kabupaten atau kota, tapi bukan untuk jabatan ketua umum atau ketua dewan, melainkan jabatan lain seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit. Untuk jabatan ketua umum dan ketua DPD harus terlebih dahulu menyandang status anggota dewasa dengan umur sekurang-kurangnya 25 tahun.

Kemudian, setelah mengikuti TRK Madya, seorang kader mesti mengikuti pengkaderan lanjutan yang dinamakan TRK Dewasa. Sistem pengkaderannya juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Cuma, masa pengkaderannya mencapai lima tahun. Bagi kader yang telah lulus mengikuti TRK dewasa ini, dia berhak mengisi jabatan di struktural partai tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berkedudukan di Provinsi. Tapi, untuk jabatan Ketua Umum dan Ketua DPW harus terlebih dahulu menyandang status anggota ahli dengan umur sekurang-kurangnya 25 tahun.

Usai mengikuti TRK dewasa, kader akan mengikuti TRK ahli di mana sistem pengkaderannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Cuma, waktunya berbeda yakni hanya tiga tahun. Kader yang telah menyandang status anggota ahli dia bisa mengisi jabatan di struktural partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di ibukota negara (Jakarta). Dalam AD/ART PKS tidak dijelaskan apakah Ketua Umum dan Ketua DPP juga harus menyandang status anggota ahli atau anggota purna. Setelah TRK ahli ada lagi jenjang pengkaderan terakhir yang dinamakan TRK purna. Mengenai berapa umur untuk bisa masuk dalam struktur partai tingkat DPP juga tidak dijelaskan.

Dengan sistem pengkaderan partai yang berjenjang seperti disebutkan di atas, sangat tidak memungkinkan masuknya kader dadakan atau istilah umumnya, kader kutu loncat masuk dalam kepengurusan PKS. Orang yang ingin masuk PKS terlebih dahulu mengikuti jenjang pengkaderan. Memang ada istilah kader eksternal PKS, maksudnya ada figur atau tokoh di luar pengurus partai memiliki pengaruh besar di masyarakat. Oleh PKS, orang tersebut dilamar untuk menjadi anggota PKS. Apabila kader tersebut bersedia menjadi anggota PKS, orang tersebut juga harus mengikuti aturan partai dan berkomitmen tinggi untuk membesarkan partai.



Kaitannya dengan anggota fraksi PKS di DPRD Kota Pontianak, sistem pengkaderan tersebut jelas sudah mereka lalui sesuai dengan tingkatannya. Karena mereka adalah anggota DPRD Kota Pontianak, maka pengkaderan yang telah lalui adalah TRK Madya. Namun, mengikuti TRK bukan dengan sendirinya boleh menjadi calon anggota legislatif. Ada lagi aturan main yang mesti diikuti empat anggota fraksi PKS itu sebelum menjadi anggota Dewan. Maksudnya, masa pengkaderan yang telah mereka lalui, kemudian seluruh item sifat sudah mereka penuhi, bukan berarti mereka boleh begitu saja mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat.

Untuk menjadi anggota Dewan, seorang calon dari PKS, harus mengikuti Pemilihan Raya (Pemira). Pemira ini adalah sarana untuk memilih calon legislatif dari PKS oleh seluruh kader PKS sesuai dengan tingkatannya. Mereka yang menjadi calon legislatif untuk DPRD kabupaten/kota atau tingkat provinsi, dikelompokkan secara terpisah. Lalu, seluruh kader PKS akan memilih sesuai dengan tingkatannya.

Pemilihan secara internal partai inilah yang menentukan seorang kader untuk menempati nomor urut calon legislatif. Kemudian, syarat untuk bisa menjadi calon legislatif tidak berdasarkan status anggota pengkaderan, artinya kader yang telah menyandang status anggota pemula, muda, madya, dewasa, atau ahli boleh mengikuti Pemira di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Karena yang menentukan di sini adalah perolehan suara, bukan berdasarkan status.

Bagi calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak akan ditempatkan di nomor urut satu berdasarkan daerah pemilihan (Dapil). Begitu juga dengan yang memperoleh suara nomor dua, tiga, empat, dan seterusnya ditempatkan berdasarkan nomor tersebut di Dapilnya masing-masing. Bagi empat anggota fraksi PKS yang sekarang duduk di DPRD Kota Pontianak adalah mereka yang meraih suara terbanyak di Pemira internal PKS. Jadi, jenjang kader itu tidak menentukan, maksudnya, jenjang kader tetap diperhatikan, tapi bukan satu-satunya instrumen untuk menentukan calon legislatif. Yang justru sangat menentukan adalah kemampuan kader untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan harapan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya.

Kuatnya sistem pengkaderan yang dibangun di dalam tubuh PKS, sehingga banyak anggotanya kurang terbiasa bergaul masyarakat lain, sehingga ada yang mengatakan PKS jago kandang. Pengajian yang mereka lakukan dari rumah ke rumah dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan kesan kader PKS eksklusif. Namun, PKS tetap berusaha untuk menjadi partai terbuka, artinya masyarakat dari kalangan mana saja boleh mengikuti pengajian yang mereka laksanakan.

Setelah mengikuti masa pengkaderan sesuai tingkatan dan mengikuti Pemira, empat anggota fraksi PKS sebelum menjadi anggota Dewan harus melakukan kampanye. Kampanye merupakan sarana komunikasi politik yang dilakukan empat anggota fraksi PKS untuk menarik simpati rakyat. Saat mereka berjuang untuk duduk di kursi legislatif pada Pemilu 2004, mereka banyak melakukan sosialisasi dan rekrutmen politik dengan cara banyak melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Jenis komunikasi yang sering dilakukan adalah intrapersonal, sebelum melakukan sosialisasi dan rekrutmen politik terlebih dahulu mereka merancang dan membuat program dengan menurut pemikiran sendiri. Setelah itu mereka melakukan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 1999 hanya memperoleh satu kursi di DPRD Kota Pontianak, tapi pada Pemilu 2004, PKS berhasil meraih empat kursi. Dari satu kursi menjadi empat kursi membuktikan PKS mengalami perkembangan pesat dari perpolitikan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Kota Pontianak. Ini terjadi karena PKS berhasil membangun komunikasi politik yang intensif dengan konsituennya.
2. Dalam melakukan komunikasi politik, empat anggota fraksi PKS DPRD Kota Pontianak melakukannya dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Komunikasi politik secara formal dilakukan berdasarkan jadwal resmi yang ditetapkan oleh KPUD seperti jadwal kampanye ketika mereka belum duduk sebagai anggota legislatif. Saat mereka duduk sebagai legislatif, komunikasi formal ditentukan oleh DPRD Kota Pontianak. Jadwal resmi tersebut biasanya disebut reses. Dalam kegiatan reses ini, seluruh anggota DPRD Kota Pontianak, termasuk empat anggota fraksi PKS akan turun ke lapangan melakukan

komunikasi dengan para pemilihnya, dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Sementara komunikasi politik secara informal atau tidak resmi adalah komunikasi yang paling sering mereka lakukan. Saat melakukan kampanye, komunikasi politik yang sering mereka lakukan adalah door to door (dari rumah ke rumah). Selain itu, komunikasi politik yang kontinu mereka lakukan berupa Training Orientasi Partai (TOP) bagi masyarakat pemula yang ingin masuk PKS. Setelah itu dilanjutkan dengan Taklim Rutin Partai (TRP). Usai menjalani TRK, dilanjutkan dengan TOP tahap dua. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Taklim Rutin Kader (TRK) yang dimulai dari tahap pemula, muda, madya, dewasa dan purna.

Selanjutnya, komunikasi politik empat anggota fraksi PKS adalah secara personal, dilakukan dengan memperlihatkan sikap teladan yang baik terhadap konstituennya. Membuka diri dengan siapa saja, tanpa pandang bulu. Sarana komunikasi seperti hand phone, telepon rumah tidak dimatikan selama 24 jam demi menjangkau aspirasi dari konstituennya.

3. Tingkatan konstituen empat anggota fraksi PKS beragam. Namun yang paling adalah dari kalangan aktivis mahasiswa. Selain itu, jemaah yang mengikuti TOP dan TRP, TOP 2, dan TRK. Jemaah yang mengikuti sistem pengkaderan ini terbagi lagi, ada yang jemaahnya khusus pemuda, dan ada yang lagi yang khusus kalangan profesional (karyawan, buruh dan sebagainya) dan kaum ibu-ibu, serta kalangan umum di mana pesertanya bebas. Selain itu, simpatisan yang memiliki hubungan emosional dengan PKS, tapi tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan PKS.
4. Empat anggota fraksi PKS dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituennya ada halangan yang mereka hadapi, di antaranya: faktor waktu, Sumber Daya Manusia (SDM) konstituen, dan dana. Selain itu faktor penghambat, ada juga faktor pendukung sehingga membuat komunikasi mereka lancar, di antaranya: faktor peran pengurus PKS, media massa, dan alat transportasi dan komunikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asmu'i Achyar. 2007. *Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Disampaikan dalam Seminar dalam acara Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar di Gedung Zamrud Khatulistiwa Pontianak 24 Juni 2007.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Kota Pontianak Dalam Angka*. Pontianak: BPS
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012*. Pontianak: Bappeda.
- Basri, Faisal. 2004. *Di Balik Ambruknya Perekonomian Indonesia: Politikus Senayan Bertanggung Jawab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- , dan Ibrahim Ambong. 1993. *Fungsi Legislasi dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2000. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 2004. *Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai dan Caleg PKS*. Pontianak: Fraksi PKS DPRD Kota Pontianak.
- Hafinudin, Didin. 2001. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Losco, Joseph dan Leonard Williams. 2005. *Political Theory Kajian Klasik dan Kontemporer Edisi Kedua*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manaf, Munafrizal. 2005. *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: IRE.
- Marbun, BN. 1991. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy J. M.A. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdatul Ulama Pergulatan Pemikiran Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif Edisi III*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhammad. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naull, William H. and Robert O. Zelemy. 1987. *The World Book Dictionary*. Chicago Illinois USA: World Book Inc.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noeng, Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Parma, SV. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Parwadi, Redatin (editor). 2007. *Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis*. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.
- Purwoko, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM.



- Rakhmat, Jalaludin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soehardjo, Rusdi. 2004. *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumarno, A.P. 1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Adtya Bahkti.
- Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafie, Inu Kencana dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Thaib, Dahlan. 1994. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyudi, JB., 1992. *Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, JB. 1999. *Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi*. Bandung: Alumnus.
- Wuryanduri, Ganewati. 1991. *Memahami Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.